

PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER

Agung Parmono

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
agungparmono1612@gmail.com

Aminatus Zahriyah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
aminatuszahriyah@iain-jember.ac.id

***Abstract:** Micro, small and medium enterprises are one of the businesses that have an important role in the economic growth of a country. This is because micro, small and medium enterprises are able to become stabilizers and dynamics for countries, especially developing countries such as Indonesia. The objectives of this study are: 1. to describe the financial reporting of Micro, Small and Medium Enterprises in Jember Regency, 2. to know the financial reporting of Micro, Small and Medium Enterprises in Jember Regency according to SAK ETAP. The analytical method used is a qualitative descriptive analysis method. With the qualitative descriptive analysis method, the financial reports that become simulations are analyzed qualitatively, namely by reviewing, describing, analyzing, and explaining the numbers obtained to get a description of the Financial Reports that are in accordance with SAK ETAP, besides that the researcher also uses triangulation methods and triangulation source. The development of MSME in Jember Regency is highly growing. MSME in Jember Regency so far, its members have always won in several creative events with the help of several parties, but always lose because they do not have financial reports that comply with standards (SAK ETAP / EMKM). So far, the financial reports made by MSME have only carried out simple reporting, namely only money output and money input (cash flow). MSME financial reports in Jember Regency still need support. MSME still have a simple mindset, that is, as long as they still have funds to carry out production, they are still considered to make a profit. MSME in Jember Regency have not been able to prepare financial reports such as balance sheets, income statements and changes in capital.*

Keywords: MSME Financial Reporting, SAK ETAP

Abstrak: Usaha Mikro kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan Usaha kecil Mikro dan Menengah mampu menjadi stabilitator dan dinamisator bagi negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan penelitian ini 1. Untuk Mendeskripsikan Pelaporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember, 2. Untuk Mengetahui pelaporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember sesuai dengan SAK ETAP. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, laporan keuangan yang menjadi simulasi dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan angka-angka yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP, selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Adanya penerapan *economic entity concept* serta pencatatan akuntansi sederhana pada salah satu Usaha Mikro kecil dan Menengah menimbulkan manfaat yang baik untuk waktu berjalan maupun untuk pengembangan kedepannya. Perkembangan UMKM di Kabupaten Jember sangat berkembang, UMKM di Kabupaten Jember selama ini para anggotanya selalu menang dalam beberapa ajang kreatifitas dengan bantuan beberapa pihak, akan tetapi selalu kalah karena tidak punya laporan keuangan yang sesuai standart (SAK ETAP/ EMKM). Selama ini laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM hanya sekedar melakukan pelaporan yang sederhana, yaitu hanya uang keluar dan uang masuk saja (arus kas). Laporan keuangan UMKM di kabupaten Jember masih perlu pendampingan. Para UMKM masih berpikiran sederhana, yaitu selama masih memiliki dana untuk melakukan produksi maka masih dianggap menghasilkan laba. UMKM di Kabupaten Jember belum bisa menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan perubahan modal.

Kata Kunci: Pelaporan Keuangan UMKM, SAK ETAP

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan Usaha kecil Mikro dan Menengah mampu menjadi stabilisator dan dinamisator bagi negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia posisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. Mulai dari peranannya dalam pembentukan PDB sekitar 63,58%, kemampuannya menyerap tenaga kerja sebesar 99,45% atau sangat besarnya jumlah unit usaha yang terlibat yakni sekitar 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, sehingga peranannya cukup signifikan dalam nilai ekspor total, yang mencapai 18,72%. (Niode:2009). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur merupakan sektor yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian, hal ini dikarenakan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Kontribusi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa timur sebesar 54,98% atau sebesar Rp. 1.1689,88 triliun. Industri Jawa Timur 54,34 % berasal dari UMKM dan mampu menampung 98 % tenaga kerja. Sehingga selain mensejahterakan pelaku UMKM, juga mampu membantu pemerintah dalam pengentasan pengangguran. (BAPPEDA Jawa Tmur, 2016)

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja UMKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	PACITAN	221.784	20	MAGETAN	233.043
2	PONOROGO	306.487	21	NGAWI	309.653
3	TRENGGALEK	194.016	22	BOJONEGORO	471.481
4	TULUNGAGUNG	280.424	23	TUBAN	370.537
5	BLITAR	406.719	24	LAMONGAN	421.825
6	KEDIRI	395.355	25	GRESIK	239.182
7	MALANG	826.375	26	BANGKALAN	210.003
8	LUMAJANG	287.251	27	SAMPANG	264.569
9	JEMBER	729.962	28	PAMEKASAN	257.481
10	BANYUWANGI	501.379	29	SUMENEP	486.196
11	BONDOWOSO	277.434	30	KOTA KEDIRI	51.039
12	SITUBONDO	263.547	31	KOTA BLITAR	35.439
13	PROBOLINGGO	397.327	32	KOTA MALANG	141.906
14	PASURUAN	403.965	33	KOTA PROBOLINGGO	41.120
15	SIDOARJO	306.481	34	KOTA PASURUAN	44.520
16	MOJOKERTO	262.651	35	KOTA MOJOKERTO	31.212
17	JOMBANG	328.380	35	KOTA MADIUN	41.557
18	NGANJUK	322.229	37	KOTA SURABAYA	466.779
19	MADIUN	242.654	38	KOTA BATU	45.477
JAWA TIMUR				11.117.439	

Sumber : Diskop UKM Jawa Timur, (2019)

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Jumlah Tenaga Kerja yang mampu diserap oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebesar 11.117.439 jiwa, jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dalam membantu pengentasan pengangguran, belum lagi multiplier effect dari perkembangan UMKM terhadap sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yang lain.

Di Kabupaten Jember sendiri Usaha Keci Mikro dan Menengah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 729.962 jiwa, Di Kabupaten Jember Usaha Mikro Kecil dan Menengah

berjumlah 181.147 unit di tahun 2012 (BPS, pendataan UMKM 2012), akan tetapi yang terdaftar di Diskop UMKM Jember sejumlah 2410 unit di tahun 2014 dan meningkat kembali 4097 unit di tahun 2016 yang terbagi dalam 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. (Diskop UMKM Kabupaten Jember, 2019)

Akan Tetapi Banyak Permasalahan yang dialami oleh para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah, diantaranya Pemberian pinjaman kepada UMKM menggunakan skema pembiayaan kompetitif. Bahkan suku bunga yang berlaku saat ini justru untuk corporate hanya sekitar 12% sedangkan untuk UMKM atau koperasi mencapai 14% hingga 18%. Berdasarkan data yang ada realisasi kredit perbankan saat ini sebesar Rp. 383 triliun namun kredit yang dikucurkan kepada UMKM hanya mencapai Rp. 110 triliun atau sekitar 25%, padahal idealnya adalah diatas 40%. Banyak UMKM yang tidak mendapatkan pinjaman dari Bank karena dianggap tidak *bankable*.

Pelaporan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis Usaha Mikro, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pelaporan keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi pelaku Usaha Mikro mengenai akuntansi sangat terbatas, latar belakang pendidikan para pelaku Usaha Mikro juga mempengaruhi pengetahuan para pelaku Usaha Mikro. UMKM menghadapi berbagai kendala atau permasalahan yang disebabkan oleh 1) rendahnya pendidikan 2) kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan 3) kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2015).

Menurut Setyorini, *et.al.* (2010) menyatakan pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Beberapa pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh laba (Setyorini, *et.al.*, 2010). Banyak pelaku UMKM merasa bahwa perusahaan mereka berjalan normal namun sebenarnya UMKM tersebut tidak mengalami perkembangan. Ketika mereka mendapatkan pertanyaan mengenai laba yang didapatkan setiap periode, mereka tidak bisa menunjukkan dengan nominal angka melainkan dengan

aset berwujud seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Lebih lanjut, aset tersebut didapatkan tidak hanya dengan dana perusahaan tetapi terkadang ditambah dengan harta pribadi. Aset tersebut terkadang juga bukan digunakan untuk perusahaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak terdapat pencatatan ataupun pemisahan di antara keduanya.

Seperti yang diungkapkan Risnaningsih (2017) Adanya penerapan *economic entity concept* serta pencatatan akuntansi sederhana pada salah satu Usaha Mikro kecil dan Menengah menimbulkan manfaat yang baik untuk waktu berjalan maupun untuk pengembangan kedepannya. Manfaat yang dirasakan Usaha Mikro adalah memudahkan pengusaha ketika ingin mengembangkan usahanya melalui pinjaman pada pihak lain (Pihak Bank) karena mempunyai informasi keuangan, dapat mengetahui laba, kondisi keuangan, perubahan modal pemilik dan arus kas usaha karena tidak tercampur lagi dengan harta pribadi, sehingga perencanaan maupun pengendalian kas dalam usaha akan dilakukan ketika kas usaha mengalami perubahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Wismiarsi, 2008:6).

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012:2). Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.

Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara. Tidak terdapat kesepakatan umum dalam membedakan sebuah Mikro Ekonomi (MiE) dari sebuah UK atau UK dari sebuah UM, dan yang terakhir dari sebuah UB.

Namun demikian, secara umum, sebuah UMi mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang didalam *literature* sering disebut *self employment*. Sedangkan sebuah UKM dapat berkisar antara kurang dari 100 pekerja (Di Indonesia), dan 300 pekerja (Di China).

Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan dibanyak Negara, definisi UMKM berbeda antar sektor, misalnya di Thailand, India, dan China, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya Indonesia dan Pakistan (Tambunan, 2012:3).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Pada Tabel 2 akan dijelaskan mengenai klasifikasi Usaha Miko, Kecil dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM:

Tabel 2. Tabel Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	Maksimal 3 Miliar
Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 – 50 Miliar

Sumber: UU No.20/2008

2.1.2 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria, diantaranya:

- a. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- d. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

2.1.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

- a. daya tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

- b. padat karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

c. keahlian khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. jenis produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan ukir-ukiran kayu.

e. keterkaitan dengan sektor pertanian

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

f. permodalan

Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja (Tambunan, 2002:166).

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar (Tambunan, 2002:169).

2.1.4 Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.

Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, pukul 20:32 (<https://www.ekon.go.id/berita/view/paketkebijakan-ekonomi-paket.1751.html>).

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar 16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (*year on year*) pada akhir Juni 2015. Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja

terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakat khususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR.

2.1.5 Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya berhubungan dengan informasi keuangan secara kuantitatif yang berguna untuk mengambil keputusan. Semakin profesional akuntan dalam proses pembuatan laporan keuangan atau siklus akuntansinya, maka akan semakin baik juga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan. Akuntansi menyediakan cara-cara untuk mengumpulkan dan melaporkan data ekonomis kepada bermacam-macam pihak yang membutuhkan. Pemilik dan calon pemilik dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Pihak bank atau pemberi kredit dapat menilai kemampuan perusahaan dalam beroperasi yang pada gilirannya mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi sebelum peminjaman. Badan pemerintah berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan pemerintah, misalnya peraturan perpajakan.

Menurut Harahap (2011:5) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal dari suatu bisnis.

Menurut Samryn (2011:3) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi keuangan.

Akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi. Informasi akuntansi sangat potensial untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti: manajer perusahaan, pemilik, kreditur, pemerintah, analisis keuangan dan karyawan. Manajer perusahaan membutuhkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial dan bisnis, Investor tentunya dalam ekspektasi dan harapan terhadap hasil investasinya dalam bentuk hasil usaha dan keuntungan (deviden), kreditur berkepentingan terhadap kemampuan bayar terhadap kewajiban perusahaan dalam menyelesaikan pinjamannya, pemerintah memerlukan informasi terhadap pajak dan regulasi (peraturan), analisis keuangan menggunakan akuntansi untuk dasar menyatakan opini (pendapat) terhadap investasi yang akan direkomendasikan, karyawan berharap ingin bekerja di perusahaan yang mampu untuk mendukung pengembangan karir dan penghasilan yang lebih baik. Untuk mengetahui akuntansi secara lebih mendalam sebaiknya mengerti terlebih dahulu definisi atau batasan akuntansi.

Berikut di bawah ini adalah beberapa definisi akuntansi: AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) pada tahun 1941, mendefinisikan akuntansi sebagai :

“seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya.”

Dari definisi ini ada 3 aspek penting yaitu :

1. Akuntansi adalah suatu proses, yaitu proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi.
2. Akuntansi memproses transaksi keuangan dengan cara yang mempunyai pola tertentu (bukan sembarang atau acak-acakan) dan menggunakan satuan uang sebagai alat pengukur.
3. Akuntansi tidak sekadar proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan belaka, melainkan meliputi juga penafsiran terhadap hasil dari proses-proses tersebut.

Pengertian akuntansi menurut Soemarso (2004) yaitu:

“.... proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.”

Definisi tersebut mengandung 2 pengertian, yakni

1. Kegiatan akuntansi Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Kegunaan akuntansi Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan

2.1.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi banker, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan terdiri dari lima macam, yaitu Laporan Laba/Rugi, Neraca, Perubahan Modal, Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. (Isnawan:2012:60)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Ikatan Akuntan Indonesia,2016).

Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012:24) :

- 1) Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.
- 2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditur, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.
- 3) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 4) Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya.

2.1.7 Pengertian Laporan Keuangan Menurut PSAK

Pengertian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 1 (2015:1),

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Kieso (2007) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait dengan kondisi keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas.

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. “

Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah: “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial”

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2007:2) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau efektivitas perusahaan tersebut.

Pengertian Laporan Keuangan menurut Baridwan (2004:17) adalah “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi mengenai keadaan suatu posisi perusahaan sehingga hasil yang didapat dari laporan keuangan tsb. dapat mempengaruhi pendapat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.7 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.

Jenis laporan keuangan menurut Harahap yang berjudul Analisis Kritis atas Laporan Keuangan (2004:106), menyatakan bahwa: Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan pendukung, seperti; Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Kegiatan Keuangan.

Menurut Munawir yang berjudul Analisa Laporan Keuangan (2007:13) menyatakan bahwa : Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca,

Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain.

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.

Menurut SAK ETAP (2013:17), laporan keuangan yang lengkap meliputi:

1. Neraca. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.
2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.
3. Laporan perubahan ekuitas; Dalam laporan ini menunjukkan Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk

periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4. Laporan arus kas Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.

2.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3)

“memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.” Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut SAK ETAP (2013), dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: “asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan

kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas.”

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

2.1.9 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan menurut Martani (2012:33) adalah:

1. investor Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas.
2. Karyawan Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberian jaminan Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur lain Kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan Kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah Menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Berdasarkan penjelasan mengenai pengguna laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan baik investor, karyawan, pemerintah, dll.

2.1.10 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP (2013:2)

karateristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.

2. **Relevan Informasi** memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. **Materialitas Informasi** dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
4. **Keandalan Informasi** memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
5. **Pertimbangan Sehat** Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
6. **Kelengkapan** Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.
7. **Dapat Dibandingkan** Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
8. **Tepat Waktu** Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

9. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, pertmbangan sehat, dan lain-lain.

2.1.11 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Menurut SAK ETAP (2013:1), SAK ETAP dimaksudkan untuk: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa kuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga permeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 namun penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. (<http://auliamharaniputri.blogspot.com/2013/06/>)

Berdasarkan penjelasan mengenai standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik diatas, dapat disimpulkan bahwa pengguna SAK ETAP merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan, dan penerapan SAK ETAP dapat dilakukan pada atau setelah 1 januari 2011. 2.4 Tujuan Penyusunan SAK ETAP

Menurut Martani (2011), Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan:

1. PSAK - IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan kecil menengah mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak sedikit.
2. PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi).
3. PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgement.
4. PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Oleh karena itu SAK ETAP digunakan oleh perusahaan kecil menengah sebagai standar akuntansi keuangan perusahaan mereka.

Menurut Martani (2011), menyatakan bahwa:

“Penerapan SAK ETAP lebih sederhana dibanding penerapan PSAK umum yang mengacu pada IFRS karenan SAK ETAP mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan.”

Sedangkan menurut Basir (2010), menyatakan bahwa: Penerapan SAK ETAP bebas diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak teralau membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK umum.

2.1.12 Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut (SAK EMKM, 2016)

- 1) Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas
- 2) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik
- 3) Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

- 1) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal
- 2) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan asset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu asset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria :

- 1) Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos asset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas
- 2) Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal.

Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari

transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representative tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelapor pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari :

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- 2) Laporan laba rugi selama periode
- 3) Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pospos berikut :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Piutang
- 3) Persediaan
- 4) Asset tetap
- 5) Utang usaha
- 6) Utang bank
- 7) Ekuitas

Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut :

- 1) Pendapatan
- 2) Beban keuangan
- 3) Beban pajak

Catatan atas laporan keuangan memuat :

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- 3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Yayuk Sulistyowati, 2017, pencatatan pelaporan keuangan UMKM study kasus di kota malang, Hasil penelitian diketahui bahwa laporan keuangan pada UMKM masih sederhana dengan melakukan pencatatan transaksi yang sering terjadi dalam usahanya dan SAK ternyata masih belum dipahami para pelaku UMKM. Salah satu yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena latar belakang pendidikan yang kurang dan sosialisasi atau pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UMKM masih kurang maksimal sehingga pemahaman akan pentingnya laporan keuangan masih belum dipahami pelaku UMKM.
2. Jilma Dewi Ayu Ningtyas, 2017, Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan), hasil penelitian ini adalah laporan keuangan UMKM Bintang Malam yang disusun peneliti berdasarkan SAK EMKM menyajikan Posisi keuangan yang disajikan dalam neraca per 30 April 2017 menunjukkan total asset perusahaan sebesar Rp 869,585,400 jumlah liabilitas sebesar Rp108,987,500 dan modal sebesar Rp760,592,900 laba bersih perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan pada bulan April 2017 sebesar Rp 75,815,000. Catatan atas laporan Keuangan yang menyajikan gambaran umum perusahaan, pernyataan bahwa penyusunan laporan menggunakan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan yang digunakan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam instrument keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan UMKM Bintang Malam.
3. Ketut Ari Warsadi, Nyoman Trisna Herawati, dan I Putu Julianto, 2017, Asas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada PT. MAMA JAYA. Penelitian ini menunjukkan bahwa UKM menyusun laporan keuangan masih sangat sederhana dan manual dikarenakan UKM hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran guna mendapatkan informasi laba saja.
4. Mortigor Afrizal Purba, 2018, Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam. Kesimpulan dalam penelitian adalah Manajemen hanya menyusun laporan kegiatan usaha yang mereka anggap

sebagai laporan keuangan. Padahal laporan tersebut masih sangat jauh dari patuh pada standar akuntansi keuangan. Laporan tersebut digunakan untuk mengatur keuangan Manajemen Akan tetapi manajemen UMKM selalu memberikan perhatian pada ketertiban dan ketelitian dalam bertransaksi dengan penerbitan nota transaksi.

5. Eko Suadi, 2019, Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM (Studi Pada Sentana Art Wood). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencatatan di UD Sentana Art Wood masih sederhana, yaitu mencatat berdasarkan pemasukan dan pengeluaran. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi menunjukkan bahwa perusahaan laba sebesar Rp102.959.099. Laporan posisi keuangan menunjukkan asset sejumlah Rp6.267.838.451, liabilitas sejumlah Rp2.665.894.052 dan ekuitas sejumlah Rp3.601.944.399. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan mulai dari laporan umum entitas, kebijakan akuntansi entitas dan penjelasan-penjelasan setiap rekening pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi

3. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6)

3.1 Jenis penelitian

Menurut Umar (2003:32) Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas suatu objek tertentu yang biasanya relatif kecil dalam kurun waktu tertentu. Keunggulan metode studi kasus adalah

bahwa hasilnya dapat mendukung pada studi-studi kasus yang lebih besar di kemudian hari, dapat memberikan hipotesishipotesis untuk riset lanjutan. Di samping keunggulan-keunggulan, metode inipun memiliki kelemahan-kelemahan misalnya bahwa kajiannya menjadi relatif kurang luas, sulit digeneralisasi dengan keadaan yang berlaku umum, cenderung subjektif, karena objek riset dapat mempengaruhi prosedur riset yang mesti dilakukan.

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999;26) tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu. Lingkup penelitian kemungkinan berkaitan dengan suatu siklus kehidupan atau hanya mencakup bagian-bagian tertentu atau unsur-unsur dan kejadian secara keseluruhan.

3.2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah UMKM yang berada di kabupaten Jember.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah para pelaku usaha UMKM di kabupaten Jember yang memiliki asset sebesar 50 – 500 juta rupiah

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Kuantitatif:

Data Kuantitatif diperoleh dari beberapa catatan historis dan arsip dari beberapa UMKM, Catatan-catatan, laporan-laporan keuangan, neraca, laba/rugi yang dimiliki oleh UMKM, nilai-nilai asset, ekuitas yang diakui oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan atau tidak.

b. Data Kualitatif:

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari UMKM dengan cara pengamatan langsung dan hasil wawancara kepada para informan

3.5 Teknik Pengumpulan

Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, misalnya struktur organisasi dan laporan keuangan.

- b. Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh nilai aset yang baru, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan metode komparatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, laporan keuangan yang menjadi simulasi dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah, dan menjelaskan angka-angka yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK, selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi data, berupa triangulasi metode, triangulasi sumber data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil UMKM Kabupaten Jember

Kriteria sesuai UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Besar:

- a. Kekayaan Bersih/th > 10 M
- b. Hasil Penjualan > 50 M

Usaha Menengah:

- a. Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M
- b. Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M

Usaha Kecil:

- a. Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt
- b. Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M

Usaha Mikro:

- a. Kekayaan Bersih/th < Rp 50 Jt
- b. Hasil Penjualan < Rp 300Jt

Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember, Jumlah UMKM di Kabupaten Jember sebesar 57.714 Unit. Dimana untuk usaha Menengah 1.452 Unit (3%), Usaha Kecil sebesar 15.577 Unit (27%) dan Usaha mikro sebesar 40.685 Unit (70%). Jadi di Kabupaten Jember yang paling banyak adalah Usaha Mikro.

Tabel 3 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2013 – 2017

NO.	JENIS UMKM	2013	2014	2015	2016	2017
1	USAHA MIKRO	31.673	35.193	37.842	40.691	40.685
2	USAHA KECIL	11.338	12.537	13.522	14.504	15.577
3	USAHA MENENGAH	1.018	1.100	1.170	1.258	1.452
	TOTAL	44.092	48.830	52.534	56.453	57.714

Sumber: BPS Kabupaten Jember 2019

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2019 dapat diketahui bahwa usaha mikro dari tahun ke tahun semakin meningkat, yang pada tahun 2017 sebesar 31. 673 usaha menjadi 40.685 usaha di tahun 2017. Akan tetapi dari beberapa usaha mikro tersebut hanya beberapa yang terdaftar di dinas koperasi dan usaha mikro. Seperti terlihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4 Perkembangan Usaha Mikro yang Memiliki Surat Keterangan Usaha

NO.	JENIS UMKM	2013	2014	2015	2016	2017
1	USAHA MIKRO	31.673	35.193	37.842	40.691	40.685
	TERLAYANI SKU	1.077	2.444	3.064	4.297	5.052

Sumber: Data Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kab. Jember, 2019

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa usaha mikro dikabupaten jember, hanya sedikit yang memiliki sku. Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi: 2004).

4.2. Pelaporan keuangan UMKM di Kabupaten Jember

Ketua Komunitas ASPA, Imam Syafi'I menyatakan bahwa Komunitas ASPA dibentuk oleh bapak Syafi'I sejak tahun 2014 yang bertujuan untuk mesolidaritkan para pengrajin batik. UMKM ini yang tahu Cuma memproduksi, ya bagaimana cara menyalurkan kebiasaan mereka menjadi suatu bentuk produk, untuk berfikir mendapat keuntungan belum sampai kesana (laporan keuangan) yang penting memproduksi menghasilkan karya dulu, ke pemasarannya pun belum tentu kadang masih bingung mau dipasarkan kemana, apalagi mau membuat pembukuan atau laporan keuangan, lah wong uang untuk biaya sekolahpun jadi satu kesana, biaya sehari-haripun ambil ke sana. Apalagi kalo ditanya soal Neraca pasti UMKM hanya pernah dengar tapi tidak tahu bagaimana bentuknya. Mau buat Harga Pokok Penjualan mana bisa. Merawat komunitas UMKM ataupun membentuk UMKM susah, karena mensolidkan mereka itu susah, banyak masyarakat disini yang berfikir negatif bahwa komunitas hanya untuk mensejahterakan pengurus saja tapi bukan semua anggota.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan Saragih dan Surikayanti (2015) dengan judul Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan menemukan bahwa (1) penerapan akuntansi dilihat dari penyajian pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar UKM hanya membuat laporan laba-rugi. (2) Penerapan akuntansi yang dilakukan UKM di Jalan Seram, kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai SAK ETAP serta tidak adanya Sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami pelaku UKM.

Ibu lestari kusumawati pemilik Restis mBoeloe, pengurus SEHATI komunitas pengrajin batik jember. bu lestari mendirikan griya batik ini sejak 2014, karena beranggapan bahwa disekitarnya belum ada pengrajin batik, batik karya bu lestari yang membedakan dari btik lainnya yaitu ada batik yang pewarnanya terbuat dari bahan alami yang diolah sendiri dari pewarna pewarna alam. Bu lestari sudah sampai berkeliling untuk study banding pengolahan batik sampai ke pengolahan limbahnya, terakhir beliau

ke museum batik Yogyakarta. Untuk omset sendiri lumayan sekitar 2 juta perhari karena beliau sudah memiliki nama hingga keluar negeri dan rajin ikut pameran, dengan omset sebanyak itu Bu Lestari masih lebih baik soal pelaporan keuangan Griya batiknya, karena beliau sudah memiliki pembukuan khusus walau hanya sebatas buku pengeluaran dan pemasukan. Beliau mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap hari dari Griya batiknya dan memiliki staf tersendiri untuk mencatatnya.

Dari pihak perbankan dari Bank Mandiri, Pamuji Widodo. mengatakan bahwa banyak UMKM yang belum mampu menunjukkan adanya laporan keuangan jadi hal itu yang dapat menghambat UMKM memperoleh dana dari perbankan, banyak dari UMKM yang gagal memperoleh modal dari bank karena masalah laporan keuangan. Sehingga terkadang pihak perbankan membuat inisiatif membuat laporan keuangan berdasarkan nota pembelian dan penjualan dari UMKM. Menurut beliau sangat penting pelaporan keuangan bagi UMKM, yang dapat memudahkan mereka mendapatkan bantuan modal.

Pemberian pinjaman kepada UMKM menggunakan skema pembiayaan kompetitif. Bahkan suku bunga yang berlaku saat ini justru untuk korporasi hanya sekitar 12% sedangkan untuk UMKM atau koperasi mencapai 14% hingga 18%. Berdasarkan data yang ada realisasi kredit perbankan saat ini sebesar Rp. 383 triliun namun kredit yang dikucurkan kepada UMKM hanya mencapai Rp. 110 triliun atau sekitar 25%, padahal idealnya adalah di atas 40%. Banyak UMKM yang tidak mendapatkan pinjaman dari Bank karena dianggap tidak bankable. Pelaporan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis Usaha Mikro, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pelaporan keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi pelaku Usaha Mikro mengenai akuntansi sangat terbatas, latar belakang pendidikan para pelaku Usaha Mikro juga mempengaruhi pengetahuan para pelaku Usaha Mikro. UMKM menghadapi berbagai kendala atau permasalahan yang disebabkan oleh 1) rendahnya pendidikan 2) kurangnya pemahaman teknologi informasi, dan 3) kendala penyusunan laporan keuangan (Muchid, 2015).

Adanya penerapan *economic entity concept* serta pencatatan akuntansi sederhana pada salah satu Usaha Mikro kecil dan Menengah menimbulkan manfaat yang baik untuk waktu berjalan maupun untuk pengembangan kedepannya. Manfaat yang dirasakan Usaha Mikro adalah memudahkan pengusaha ketika ingin mengembangkan usahanya melalui pinjaman pada pihak lain (Pihak Bank) karena mempunyai informasi keuangan, dapat mengetahui laba, kondisi keuangan, perubahan modal pemilik dan arus kas usaha karena tidak tercampur lagi dengan harta pribadi, sehingga perencanaan maupun pengendalian kas dalam usaha akan dilakukan ketika kas usaha mengalami perubahan. (Risnaningsih, 2017)

4.3. Pelaporan Keuangan UMKM menurut SAK ETAP

Menurut bapak Heri Purnomo ketua Jember Ekonomi kreatif, juga mengatakan bahwa perkembangan UMKM di kabupaten Jember sangat berkembang pesat (pada tabel 4 diatas). UMKM di kabupaten Jember selama ini para anggotanya selalu menang dalam beberapa ajang kreatifitas dengan bantuan beberapa pihak, akan tetapi selalu kalah karena tidak punya laporan keuangan yang sesuai standart (SAK ETAP/ EMKM). Selama ini laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM hanya sekedar melakukan pelaporan yang sederhana, yaitu hanya uang keluar dan uang masuk saja (arus kas).

Laporan keuangan UMKM di kabupaten Jember menurut Heri Purnomo masih perlu pendampingan. Para UMKM masih berpikiran sederhana, yaitu selama masih memiliki dana untuk melakukan produksi maka masih dianggap menghasilkan laba. Menurut Heri Purnomo pula UMKM di kabupaten Jember belum bisa menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi dan perubahan modal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat di lihat bahwa UMKM di kabupaten Jember belum menerapkan SAK ETAP. Standar yang ditetapkan SAK ETAP seperti memiliki Laporan posisi keuangan, laba rugi catatan atas laporan keuangan belum diterapkan oleh UMKM. Pelaporan keuangan UMKM masih terbatas pada uang masuk dan uang keluar (kas dan setara kas).

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan UMKM di Kabupaten Jember belum menerapkan SAK ETAP. Pelaporan keuangan masih terbatas pada arus kas keluar dan masuk belum menerapkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan laporan keuangan. Bagi UMKM selama uang yang dimiliki masih dapat digunakan untuk produksi berikutnya maka mereka sudah merasa menguntungkan.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini masih terbatas pada UMKM yang skala mikro (asset 50 juta dan omset 300 Juta), sedangkan untuk UMKM mikro dan kecil belum diteliti.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut diatas maka saran untuk penelitian berikutnya bisa dilakukan pada UMKM seluruhnya (mikro, kecil dan menengah) sehingga hasilnya dapat mengeneralisasi untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas,dkk. 2017. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros Di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017 : 114 – 120*. Makasar.
- Ariani, dkk. Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118*. Tarakan
- Eko Suadi, 2019, Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) Pada Umkm (Studi Pada Sentana Art Wood).
- Jilma Dewi Ayu Ningtyas, 2017, Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan), Pekalongan
- Ketut Ari Warsadi, Nyoman Trisna Herawati, I Putu Julianto, 2017, Asas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada PT. MAMA JAYA

Mortigor Afrizal Purba, 2018, Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam, Batam

Ningtyas, Jilma D.A. 2017. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM., *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi Vol 2 Nomor 1 Agustus 2017*, Medan

Putra, Adnan Husada. 2016. Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi* Oktober 2016, 5(2) hal 40-52. Surakarta.

Risnaningsih,. 2017. Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm. 41-50. Malang

Suci, Yuli Rahmani. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017*. Balikpapan.

Yayuk Sulistyowati, 2017, Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM studi kasus di kota Malang, Malang

<https://lokalkarya.com/jember-ditetapkan-sebagai-proyek-percontohan-umkm-berorientasi-ekspor.html>

[http://bappeda.jatimprov.go.id/2013/07/23/koperasi-dan-umkm-jadi-modal-dahsyat/\(23-08-2018\)](http://bappeda.jatimprov.go.id/2013/07/23/koperasi-dan-umkm-jadi-modal-dahsyat/(23-08-2018))

[http://bappeda.jatimprov.go.id/2016/08/13/umkm-tetap-jadi-kunci-pertumbuhan-perekonomian-jawa-timur/\(23-08-2018\)](http://bappeda.jatimprov.go.id/2016/08/13/umkm-tetap-jadi-kunci-pertumbuhan-perekonomian-jawa-timur/(23-08-2018))

diskopukm.jatimprov.go.id

umkm-jember.web.id